

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses pengelolaan sekolah berkembang berdasar atas konsep manajemen berbasis sekolah. Pengelolaan sekolah tidak dapat terjadi tanpa melibatkan sumber daya yang tepat, yakni melibatkan seluruh elemen dalam sekolah. Elemen sekolah yang dimaksud seperti tenaga pendidik (guru), karyawan, siswa, fasilitas sekolah, dan yang lainnya . Sebagai penunjang kegiatan mengelola, sekolah memerlukan uang untuk melaksanakan rencana sekolah yang telah ditetapkan dalam jangka dan periode tertentu.

Uang yang beredar dalam sekolah harus dikelola dengan baik berdasarkan peraturan yang berlaku . Hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah bahwasanya pengelolaan uang adalah pengelolaan kas dan surat berharga termasuk menanggulangi kekurangan kas dan memanfaatkan kelebihan kas secara optimal . Peraturan Pemerintah tersebut juga menjelaskan bahwa sekolah sebagai institusi pemerintah diawasi oleh kepala sekolah dalam pengendalian internal dan pengawas fungsional daerah serta Badan Pemeriksa Keuangan dalam pengendalian fungsional.

Organisasi Nirlaba atau Entitas Nirlaba merupakan suatu institusi yang menjalankan operasinya tidak berorientasi mencari atau mendapatkan keuntungan. Entitas nirlaba memiliki perbedaan yang cukup signifikan

dibandingkan dengan entitas yang berorientasi kepada laba. Dalam menjalankan kegiatannya, entitas nirlaba tidak semata-mata digerakan untuk mencari laba. Oleh karena itu, selayaknya entitas laba tidak defisit. Adapun jika surplus, maka surplus tersebut akan dikontribusikan kembali untuk pemenuhan kebutuhan publik bukan untuk memperkaya pemilik entitas tersebut.

Pengelolaan keuangan sekolah ini didasari pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yaitu prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik . Peraturan tersebut menjelaskan bahwa keempat prinsip tersebut digunakan dalam proses pengelolaan keuangan sekolah yang dimulai dari perencanaan, realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan, pengawasan dan pemeriksaan hingga pertanggung jawaban.

Agar dapat mewujudkan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan, maka pembenahan manajemen keuangan pendidikan nasional diperlukan untuk memberdayakan seluruh potensi pendidikan dari pusat hingga pada satuan-satuan pendidikan. Salah satu kebijakan yang paling mendasar dari pemerintah secara nasional untuk mengatasi kesulitan manajemen keuangan tersebut ialah dengan otonomi daerah (pelimpahan pengelolaan keuangan). Manajemen Berbasis Sekolah merupakan salah satu kebijakan dari pemerintah yang memberikan kewenangan kepada kepala sekolah untuk mencari dan memanfaatkan sumber dana sesuai dengan keperluan masing-

masing sekolah. Mengingat bahwa masalah utama yang sering terjadi di dalam dunia pendidikan adalah masalah akan keterbatasan dana yang ada.

Beberapa tugas pokok tersebut adalah menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan.

Sekolah diharapkan memiliki laporan pertanggung jawaban dalam bentuk laporan keuangan sekolah yang sesuai dengan standar akuntansi misal membuat jurnal umum, buku besar, neraca, laporan *surplus deficit*, laporan arus kas, serta berapa perhitungan biaya- biaya yang sudah digunakan untuk kelancaran operasional sekolah. Dalam pengelolaan keuangan sekolah untuk pencatatan, salah satu konsep akuntansi yang digunakan sekolah yaitu konsep basis kas (*cash basis*) yaitu pencatatan transaksi dan peristiwa yang diakui pada saat terjadi, baik pada kas atau setara kas diterima.

Metode yang digunakan bendahara sekolah dalam melaporkan penggunaan kasnya masih terbilang sederhana yaitu dengan menggunakan metode single entry (mencatat pemasukan serta pengeluaran) saja. Kurangnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh bendahara sekolah dalam membuat laporan arus kas yang sesuai dengan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) mengakibatkan semua yang dicatat hanya sebatas berapa kas yang diterima dari yayasan tiap bulannya dan untuk keperluan apa saja uang tersebut digunakan.

Untuk itu, entitas nirlaba dalam hal ini yaitu sekolah, mungkin akan menjadi hal yang menantang untuk dilakukan. Terlebih karena entitas nirlaba jenis ini umumnya lebih fokus pada pelaksanaan program ketimbang mengurus administrasi. Namun, hal tersebut tidak boleh dijadikan alasan karena entitas nirlaba tidak boleh hanya mengandalkan pada kepercayaan yang diberikan para donaturnya. Akuntabilitas sangat diperlukan agar dapat memberikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan kepada donatur, regulator, penerima manfaat dan publik secara umum.

Penelitian ini akan membahas bagaimana evaluasi penerapan akuntansi pengelolaan laporan kas sekolah SD Laboratorium Unesa. Adanya latar belakang diatas maka, penulis bermaksud melaksanakan penelitian dengan judul “Evaluasi Penerapan Akuntansi Pengelolaan Laporan Arus Kas Sekolah Pada SD Laboratorium Unesa“ .

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut kajian teori maupun hasil penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan bagaimana evaluasi penerapan akuntansi pengelolaan Laporan Arus Kas Sekolah pada SD Laboratorium Unesa.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi penerapan akuntansi pengelolaan Laporan Arus Kas Sekolah pada SD Laboratorium Unesa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Organisasi Sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penting bagi pengelola keuangan sekolah (bendahara) bagaimana bentuk pengelolaan laporan arus kas sekolah yang sesuai dengan prinsip akuntansi.

2. Bagi Para Akademisi

Penelitian ini diharapkan agar dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam membantu penyusunan kebijakan terkait tentang pelaporan keuangan sekolah yang sesuai menurut PSAK.

3. Bagi Penulis

Sebagai referensi dalam menambah informasi pengetahuan mengenai laporan keuangan arus kas menurut PSAK pada sekolah SD Laboratorium Unesa.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu:

Bab I. Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

- Bab II. Kajian Pustaka, terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual.
- Bab III. Metode Penelitian, terdiri dari pendekatan penelitian, keterlibatan peneliti, prosedur pengumpulan data, pengolahan analisis data, dan keabsahan temuan.
- Bab IV. Hasil Penelitian & Pembahasan terdiri dari gambaran umum obyek/ subyek penelitian, deskripsi hasil penelitian, pembahasan dan proposisi.
- Bab V. Penutup terdiri dari simpulan dan saran